

LAPORAN
RENCANA KINERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2019



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA

Jl. Gajah Mada No.10 Kel.Pane Kota Bima-NTB

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dapat menyelesaikan Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019.

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 merupakan sarana akuntabilitas dan sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengambil langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima di masa- masa mendatang

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 merupakan sebuah cara pengukuran kinerja yang efektif untuk mengukur sekaligus mengevaluasi tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sesuai dengan bidangnya yang dilakukan secara kontinyu dan merupakan suatu gambaran konkrit sebuah instansi dalam menjalankan, menghasilkan dan sekaligus memperbaiki kinerja berdasarkan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun secara administrasi.

Atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Kota Bima, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Bima,

Drs. H. Syarifuddin, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19621029 199403 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TABEL-TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2019	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD	6
2.1.1. Efektifitas Individual Kegiatan	6
2.2.2. Efektifitas Pencapaian Sasaran	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
2.5.1. Program Usulan	18
2.5.2 Kegiatan	18
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Program.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
3.2.1. Tujuan	20
3.2.2. Sasaran	21
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV. PENUTUP.....	31
LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA(RENJA) 2020- 2021	
Beserta Pagu Indikatif beserta sumbernya perkiraan maju	

TABEL – TABEL

	Halaman
Tabel.1 Pengukuran Kinerja	7
Tabel.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019	8
Tabel. 3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran	12
Tabel. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	13
Tabel. 5 Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP	14
Tabel. 6 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 DPMPTSP kota Bima	15
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional DPMPTSP Kota Bima	20
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kota Bima	23
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD, saat ini disebut Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Selain itu juga untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019. Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik – baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga melakukan peningkatan profesionalisme aparatur untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.



Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2009 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung – gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Bima di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Import
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik dibidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan;



23. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

1. **Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2021 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
2. **Tujuan Khusus** :
 - a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
 - b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2021, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
 - c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam uraian ini akan di bahas secara rinci tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci, singkat dan jelas, Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab Ini Berisi Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019. Selain Itu Memuat Juga Maksud Dan Tujuan Penyusunan, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Bab Ini Menguraikan Tentang Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2019 Sesuai Dengan Indikator Visi dan Misi, Penyerapan Dana dan Pelimpahan Tugas Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2019.



Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab Ini Menguraikan Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima yang baru Sesuai Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan.
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal –hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah – langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa – masa yang akan datang.

2.1.1. Efektifitas Individual Kegiatan

Efektifitas individual kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk diwujudkan hasil yang diinginkan. Pengukurannya difokuskan pada capaian Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu.

Selama tahun 2019 Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima melaksanakan 8 Program dengan 39 kegiatan strategis berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa 39 kegiatan di atas telah mencapai rata – rata 98,38 % berhasil artinya tingkat efektifitas kegiatan telah dicapai karena angka capaian kegiatan berada di atas angka 80 %.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh faktor – faktor antara lain :

1. Adanya Kemitraan dan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dengan Dinas Teknis terkait;
2. Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;
3. Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;



5. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan;

2.1.2. Efektifitas Pencapaian Sasaran

Dalam laporan ini sasaran dianggap tercapai apabila realisasi indikator – indikator kinerja sasaran berhasil diwujudkan rata – rata 100 % atau lebih. Selama tahun 2019 dari 2 (Dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ingin diwujudkan telah berhasil dicapai 99 % dari target 100 %. Hal ini didukung oleh ketersediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana yang memadai dan tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan stake holders lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019 dan capaian Renstra SKPD digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

Hasil pengukuran kinerja kegiatan adalah sebagaimana tertuang didalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir dengan ringkasan sebagai berikut :

Tabel. 1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	78,86
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase peningkatan nilai investasi	10 %
		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	10 %



Tabel. 2

Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	670.759.000,00	657.491.829,00	13.267.171,00	98,02
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pemanfaatan jasa surat menyurat	54.250.000,00	54.250.000,00	0	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.200.000,00	45.172.739,00	1.027.261,00	97,78
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan pelayanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	7.500.000,00	5.852.750,00	1.647.250,00	78,04
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	57.464.000,00	57.464.000,00	0	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan pelayanan kebersihan kantor	23.600.000,00	23.600.000,00	0	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	40.564.400,00	40.541.000,00	23.400,00	99,94
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan pangadaan	62.900.000,00	62.900.000,00	0	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0	100
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan penyediaan dan perlengkapan kebutuhan bangunan kantor	8.500.000,00	0	8.500.000,00	0
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	113.680.000,00	111.780.000,00	1.900.000,00	98,33



11	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase tamu dan pegawai yang dilayani	8.000.000,00	8.000.000,00	0	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	240.600.600,00	240.431.340,00	169.260,00	99,93
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	360.875.000,00	356.290.000,00	4.585.000,00	98,73
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan Kantor	90.500.000,00	87.300.000,00	3.200.000,00	96,46
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Porsentase Pemenuhan Peralatan Gedung kantor	43.000.000,00	42.820.000,00	180.000,00	99,58
3	Pengadaan mebeleur	Porsentase Pemenuhan Meubeler	0	0	0	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	porsentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	175.000.000,00	173.795.000,00	1.205.000,00	99,31
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	41.275.000,00	41.275.000,00	0	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	7.100.000,00	7.100.000,00	0	100
c. Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase keseragaman pakaian pegawai menunjang pelayanan perzinan	30.233.500,00	30.233.500,00	0	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Porsentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	16.720.000,00	16.720.000,00	0	100
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Porsentase Pemenuhana pakaian seragam olahraga	13.513.500,00	13.513.500,00	0	100
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	0	0	0	0



1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	0	0	0	0
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Porsentase temua internal dan eksternal - Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran, Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	128.450.000,00	127.700.000,00	750.000,00	99,42
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disampaikan tepat waktu	5.500.000,00	5.250.000,00	250.000,00	95,45
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan SAP	12.250.000,00	12.250.000,00	0	100
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	Jumlah dokumen perencanaan Kgiatan dan anggaran	54.600.000,00	54.600.000,00	0	100
4	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Jumlah dokumen Akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawabab penyelenggaraan pemerintah daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	0	100
5	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan Inventarisasi Asset	37.600.000,00	37.100.000,00	500.000,00	98,67
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	110.575.801,00	109.332.155,00	1.243.646,00	98,88
1	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Usaha yang terpantau pelaksanaan penanaman Modal	85.245.562,00	84.031.916,00	1.213.646,00	98,58
2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antar daerah	Jumlah kerjasama investasi antar daerah yang disepakati	25.330.239,00	25.300.239,00	30.000,00	99,88



g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	178.309.199,00	177.595.999,00	713.200,00	99,6
1	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	tersedianya dokumen profil penanaman modal	70.734.199,00	70.734.199,00	0	100
2	Kajian kebijakan penanaman modal	tersedianya regulasi penanaman modal	107.575.000,00	106.861.800,00	713.200,00	99,34
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	627.550.000,00	613.995.163,00	13.554.837,00	97,84
1	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	Jumlah informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan perizinan	81.200.000,00	79.725.346,00	1.474.654,00	98,18
2	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	183.100.000,00	179.772.750,00	3.327.250,00	98,18
3	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan atau yang ditindak lanjuti	70.500.000,00	67.398.167,00	3.101.833,00	95,6
4	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	30.000.000,00	28.250.000,00	1.750.000,00	94,17
5	Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	jumlah jenis izin online yang tersosialisasikan	53.500.000,00	53.500.000,00	0	100
6	Penyusunan Laporan Realisasi Perizinan	Dokumen laporan realisasi perizinan	66.000.000,00	64.500.000,00	1.500.000,00	97,73
7	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	Jumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha dan yang melakukan perpanjangan izin usaha dan non usaha	37.500.000,00	37.499.800,00	200	100
8	Kegiatan survey dan peninjauan lapangan kelayakan usaha	Jumlah izin yang layak diberikan izin usaha / perpanjang izin usaha dan non usaha	105.750.000,00	103.349.100,00	2.400.900,00	97,73
Total			2.106.752.500,00	2.072.638.646,00	34.113.854,00	98,38



2. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran adalah sebagaimana format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Terlampir sebagai berikut :

Tabel. 3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Tabel 3.2 Capaian Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	74,86	76,86	102 %	78,86	80,90	105 %
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase peningkatan nilai investasi	10 %	(348,35 %)	(3484,5%)	10 %	25 %	254 %
		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	10 %	(12,39 %)	(123,9 %)	10 %	29 %	286 %



Tabel 4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Bima**

No	Indikator *)	SPM	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n+1)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	Tahun 2020
1	Tingkat Pertumbuhan PAD		Kenaikan/penurunan pendapatan daerah dibagi pendapatan tahun lalu	200 %	116.67 %	114.2 9%	112. 5%	0%	0%	261. 83%	134.03 %	101,6 2 %	96,71 %	0 %
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Daerah		Hasil LHP BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	--

2.2. Analisis Kinerja SKPD

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2018 sampai tahun 2023, dan sebagian lagi akan dilaksanakan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya dari 8 Program dan 39 kegiatan tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian sasaran sebesar 98,38 % atau ketidaktercapiannya hanya sebesar 1,62 %.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi



kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 5

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPSTP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Merupakan suatu indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya Rancangan program awal di tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima telah berhasil melaksanakan 8 program dengan 39 kegiatan dengan capaian sasaran sebesar 98,38 % atau ketidakcapaian hanya sebesar 1,62%.

1. Akuntabilitas Penerimaan Daerah

Sebagai SKPD yang bertugas melayani perizinan yang terpusat Dinas Penanaman Modal dan PTSP melayani semua perizinan yang sebelumnya ditangani oleh masing –masing Dinas terkait.

2. Akuntabilitas Pengeluaran SKPD

Selama tahun 2019 Anggaran kegiatan sebesar Rp. 4.338.749.673,00 dengan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.231.997.173,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.106.752.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.072.638.646,- atau 98,38 %.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip pelaporan yang lazim dengan pertanggung jawaban yang telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, secara efektif dan efisien serta mengusahakan semaksimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.



Tabel. 6

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2019	REALISASI RKPD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
2 <i>Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar</i>							
2.12 <i>Bidang Penanaman Modal</i>							
1.	2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	100,00	69,24	69,24	S
	2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pemanfaatan jasa surat menyurat	12,00	9,00	75,00	S
	2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan pelayanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	100,00	85,00	85,00	T
	2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	79,00	70,00	88,61	T
	2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan pelayanan kebersihan kantor	100,00	98,00	98,00	ST
	2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	100,00	76,70	76,70	T
	2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00	110,30	110,30	ST
	2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	100,00	113,70	113,70	ST
	2.12.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan penyediaan dan perlengkapan kebutuhan bangunan kantor	100,00	0,00	0,00	SR
	2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	100,00	63,70	63,70	R
	2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase tamu dan pegawai yang dilayani	100,00	120,00	120,00	ST
	2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	100,00	149,50	149,50	ST
2.	2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	100,00	32,90	32,90	SR
	2.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung	Persentase pemenuhan perlengkapan Kantor	100,00	79,90	79,90	T



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2019	REALISASI RKPD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
		kantor					
	2.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Porsentase Pemenuhan Peralatan Gedung kantor	100,00	25,00	25,00	SR
	2.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Porsentase Pemenuhan Meubeler	100,00	0,00	0,00	SR
	2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	porsentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00	85,00	85,00	T
	2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100,00	94,20	94,20	ST
	2.12.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	100,00	100,50	100,50	ST
3.	2.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase keseragaman pakaian pegawai menunjang pelayanan perzinan	100,00	97,80	97,80	ST
	2.12.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Porsentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100,00	97,80	97,80	ST
	2.12.03.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	Porsentase Pemenuhana pakaian seragam olahraga	100,00	99,96	99,96	ST
4.	2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	100,00	0,00	0,00	SR
	2.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	100,00	0,00	0,00	SR
5.	2.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase temua internal dan eksternal -Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran,Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	100,00	76,70	76,70	T
	2.12.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disampaikan tepat waktu	2,00	2,00	100,00	ST
	2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan SAP	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	Jumlah dokumen perencanaan Kagiatan dan anggaran	4,00	75,20	1.880,00	ST
	2.12.06.06	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Jumlah dokumen Akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawabab penyelenggaraan pemerintah daerah	3,00	3,00	100,00	ST
	2.12.06.07	Peningkatan Manajemen	Jumlah dokumen Pelaporan	1,00	3,00	300,00	ST



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2019	REALISASI RKPD TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
		asset/barang Daerah	Inventarisasi Asset				
6.	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	50,00	96,30	192,60	ST
	2.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Usaha yang terpantau pelaksanaan penanaman Modal	250,00	153,80	61,52	R
	2.12.15.12	Peningkatan koordinasi dan kerjasama Investasi antar daerah	Jumlah kerjasama investasi antar daerah yang disepakati	2,00	0,00	0,00	SR
7.	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	50,00	110,20	220,40	ST
	2.12.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	tersedianya dokumen profil penanaman modal	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	tersedianya regulasi penanaman modal	1,00	3,00	300,00	ST
8.	2.12.51	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,86	170,01	221,19	ST
	2.12.51.02	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	Jumlah informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan perizinan	5,00	5,00	100,00	ST
	2.12.51.04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2.500,00	1.700,00	68,00	S
	2.12.51.07	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan atau yang ditindak lanjuti	100,00	108,50	108,50	ST
	2.12.51.08	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	2,00	1,00	50,00	SR
	2.12.51.09	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	jumlah jenis izin online yang tersosialisasikan	97,00	97,00	100,00	ST
	2.12.51.11	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	Dokumen laporan realisasi perizinan	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.51.12	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	Jumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha dan yang melakukan perpanjangan izin usaha dan non usaha	200,00	150,00	75,00	S
	2.12.51.13	Kegiatan Survei dan Peninjauan Lapangan Kelayakan Usaha	Jumlah izin yang layak diberikan izin usaha / perpanjang izin usaha dan non usaha	1.000,00	1.000,00	100,00	ST



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Program Usulan

Program Usulan kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan tahun yang akan datang untuk melaksanakan suatu rencana. Adapun Program Usulan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan.

Dari Program Usulan tersebut Program yang merupakan media untuk Peningkatan pemahaman SKPD untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan individual maupun peningkatan dinas umumnya, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

2.5.2. Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang – undangan
- 11 Penyediaan makanan dan Minuman
- 12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.
- 13 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
- 14 Pengadaan peralatan gedung kantor.
- 15 Pengadaan Meubeler
- 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.



- 21 Pengadaan pakaian olah raga.
- 22 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
- 23 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 24 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 25 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA
- 26 Penyusunan LAKIP dan LPPD.
- 27 Peningkatan Manajemen Asset/barang milik Daerah
- 28 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
- 29 Peningkatan koordinasi dan kerjasama Investasi antar Daerah.
- 30 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah
- 31 Kajian kebijakan penanaman Modal
- 32 Penyediaan Informasi/Data Base Perizinan
- 33 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu
- 34 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 35 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
- 36 Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 37 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan
- 38 Pendataan potensi obyek perijinan
- 39 Kegiatan Survey dan Peninjauan Lapangan Kelayakan Usaha

Dari kegiatan yang di laksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perizinan dan Penanaman Modal, maka dengan adanya penambahan suatu kegiatan baru akan memberikan suatu kontribusi yang sangat baik untuk menunjang suatu kegiatan program.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bima

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	-	-	-

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.



3. Menjamin komitmen terhadap kesempatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam dokumen Renstra hingga penjabarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Perijinan dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima.
- b. Merencanakan Program dan Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan
- c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima setiap tahunnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Identifikasi faktor internal yaitu :

❖ Kekuatan (Strength) :

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- d. Peta Potensi investasi
- e. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP

❖ Kelemahan (Weakness) :

- a. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi investasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

❖ Peluang (Opportunities)

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Eksistensi instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung pelayanan perijinan dan pengawasan



- e. Pengembangan industri kerajinan tangan berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.

❖ **Ancaman (Threats)**

- a. Adanya pengaduan masalah perijinan
- b. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- d. Ketidaksiesuaian kepemilikan perijinan
- e. Lemahnya daya saing industri kerajinan tangan berbasis produk kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP.



Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-					
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nilai Investasi	1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,86	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Layanan)	76,86	78,86	80,86	84,86	88,86	92,86
		2	Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp 132.591. 225.697	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10%	10%	10%	10%	10%	10%
						Porsetasi Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	10%	10%	10%	10%	10%	10%



3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis daripada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) walaupun kinerja prioritasnya adalah terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Bima.

Program dan Kegiatan yang akan dirancang harus berdasarkan Renstra SKPD seperti pada tabel berikut ini:



Laporan Renja 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

TABEL. 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	12	2.12.01	1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp641.044.000	DAU		20%	Rp751.585.890
2	12	2.12.01	1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	DPMPTSP KOTA BIMA	310 surat masuk dan keluar	Rp63.060.000	DAU		341 surat masuk dan keluar	Rp74.415.000
2	12	2.12.01	1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pembayaran Listrik dan Internet	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Bulan	Rp84.840.000	DAU		12 Bulan	Rp55.902.000
2	12	2.12.01	1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Efektivitas kerja pegawai DPMPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan kendaraan Dinas Operasional harus prima	DPMPTSP KOTA BIMA	1 Tahun	Rp5.500.000	DAU		1 Tahun	Rp9.075.000
2	12	2.12.01	1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pembayaran honorarium bendahara	DPMPTSP KOTA BIMA	12 (OB)	Rp57.464.000	DAU		12 (OB)	Rp69.531.440
2	12	2.12.01	1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	110 Bahan/Alat	Rp21.600.000	DAU		120 Bahan/Alat	Rp28.556.000



Laporan Renja 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	12	2.12.01	1 10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	85 Jenis	Rp39.800.000	DAU		85 Jenis	Rp49.082.924
2	12	2.12.01	1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	83863buah/lembar/blok/eks	Rp60.300.000	DAU		9224200buah/lembar/blok/eks	Rp76.109.000
2	12	2.12.01	1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	100 Buah/Rol/meter	Rp9.000.000	DAU		100 Buah/Rol/meter	Rp9.075.000
2	12	2.12.01	0 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Disiplin kerja pegawai DPMPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan Mesin Absensi On Line	DPMPTSP KOTA BIMA	-	0	DAU		1 Tahun	Rp10.285.000
2	12	2.12.01	1 15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	5 Eks	Rp42.480.000	DAU		5 Eks	Rp137.552.800
2	12	2.12.01	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	110 Kotak	Rp7.000.000	DAU		120 Kotak	Rp9.680.000
2	12	2.12.01	1 18	Rapat Koordinasi luar daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	1 thn	Rp250.000.000	DAU		1 thn	Rp145.321.726
2	12	2.12.01	1 19	Rapat Koordinasi dalam daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Kali	Rp0	DAU		13 Kali	Rp77.000.000
2	12	2.12.01	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp282.409.800	DAU		20%	Rp785.413.750
2	12	2.12.02	2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda Dua	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU		-	Rp0



Laporan Renja 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

1	11	2.12.01	2	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 unit	Rp27.250.000	DAU		7 unit	Rp109.505.000
2	12	2.12.01	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya pemenuhan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	2 unit	Rp8.250.000	DAU		8 unit	Rp79.860.000
2	12	2.12.01	2	10	Pengadaan Meubelair	meningkatnya Pengadaan Meubeler	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU		56 unit	Rp27.225.000
2	12	2.12.01	2	22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Meningkatnya masa manfaat gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Ruang gedung	Rp10.000.000	DAU		12 Ruang gedung	Rp235.950.000
2	12	2.12.01	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya masa manfaat kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP KOTA BIMA	12 OB	Rp30.249.800	DAU		12 OB	Rp49.942.750
2	12	2.12.01	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya masa manfaat perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 THN	Rp3.000.000	DAU		1 THN	Rp4.840.000
2	12	2.12.01	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya masa manfaat peralatan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 thn	Rp3.660.000	DAU		1 thn	Rp8.591.000
2	12	2.12.01	2	42	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 paket	Rp200.000.000	DAU		1 paket	Rp187.000.000
2	12	2.12.01	3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp0	DAU		20%	Rp37.207.500
2	12	2.12.01	3	5	Pengadaan pakaian husus hari-hari tertentu	Meningkatnya disiplin pegawai	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU		38 stel	Rp20.691.000
2	12	2.12.01	3	6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya disiplin pegawai	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU		38 stel	Rp16.516.500
2	12	2.12.01	5		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	25%	Rp0	DAU		25%	Rp55.000.000
2	12	2.12.01	5	3	Bimbingan teknis iml peraturan perundang undangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU		1 thn	Rp55.000.000



Laporan Renja 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	12	2.12.01	6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp98.921.800	DAU		20%	Rp109.928.500
2	12	2.12.01	6 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	3 dokumen	Rp14.272.000	DAU		2 dokumen	Rp6.655.000
2	12	2.12.01	6 3	Penyusunan Pelaporan Semester dan Prognosis	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	3 dokumen	Rp7.748.000	DAU		2 dokumen	Rp6.655.000
2	12	2.12.01	6 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	1 dokumen	Rp13.908.000	DAU		1 dokumen	Rp14.822.500
2	12	2.12.01	6 5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	3 Dokumen	Rp39.194.000	DAU		4 Dokumen	Rp66.066.000
2	12	2.12.01	6 6	Penyusunan LAKIP. dan LPPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	2 dokumen	Rp23.799.800	DAU		2 dokumen	Rp22.385.000
2	12	2.12.01	6 7	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang milik Daerah	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan Aset dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	0	Rp0	DAU		2 dokumen	Rp45.496.000



Laporan Renja 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

	12	2.12.0 1	15	Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Penanaman modal	DPMPTSP KOTA BIMA	%	Rp155.295.000	DAU	%	Rp406.115.000
2	12	2.12.0 1	15	8 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	terlaksananya Perusahaan yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP KOTA BIMA	50 perusahaan	Rp80.300.000	DAU	50 perusahaan	Rp153.340.000
2	12	2.12.0 1	15	12 Kerjasama Investasi antar Daerah	terlaksananya kerjasama investasi antar daerah	DPMPTSP KOTA BIMA	3 MOU	Rp74.995.000	DAU	3 MOU	Rp136.450.000
2	12	2.12.0 1	16	Program Peningkatan iklim investasi dan promosi	Meningkatnya minat investasi PMDN/PMA	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp111.815.000	DAU	20%	Rp238.821.000
2	12	2.12.0 1	16	4 Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Peizinan	tersedianya dokumen sistem informasi penanaman modal daerah	DPMPTSP KOTA BIMA	2 Dokumen	Rp69.895.000	DAU	2 Dokumen	Rp123.596.000
2	12	2.12.0 1	16	5 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	tersedianya dokumen sistem informasi penanaman modal daerah	DPMPTSP KOTA BIMA	2 Dokumen	Rp41.920.000	DAU	2 Dokumen	Rp123.596.000
2	12	2.12.0 1	51	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	Rata-rata lama proses penyelenggaraan pelayanan perizinan	DPMPTSP KOTA BIMA	1 Hari	Rp260.600.000	DAU	1 Hari	Rp962.500.000
2	12	2.12.0 1	51	1 Peningkatan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya standar pelayanan terhadap setiap izin usaha /non usaha yang diterbitkan	DPMPTSP KOTA BIMA	97 Dokumen	16.125.000	DAU	3000 lembar izin	Rp275.000.000
2	12	2.12.0 1	51	4 Penyelenggaraan pelayanan perijinan satu pintu	terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha/non usaha	DPMPTSP KOTA BIMA	2500 LEMBAR IZIN	190.375.000	DAU	3000 lembar izin	Rp275.000.000
2	12	2.12.0 1	51	13 Melakukan Verifikasi Lapangan	terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	DPMPTSP KOTA BIMA	1000 izin usaha/non usaha	54.100.000	DAU	1000 izin usaha/non usaha	Rp247.500.000



Laporan Renja 2019 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	12	2.12.0 1	17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN	IKM (Indeks kepuasan Layanan)	DPMPPTSP KOTA BIMA	Baik (62,51- 81,25)	Rp269.065.000	DAU		Baik (62,51- 81,25)	Rp261.800.000
2	12	2.12.1	17 06	Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTSE	tersedianya dokumen SOP tentang Persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha/izin operasional PBTSE	DPMPPTSP KOTA BIMA	95 SOP	48.160.000	DAU		96 sop	Rp82.500.000
2	12	2.12.1	17 07	Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	terpenuhinya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	DPMPPTSP KOTA BIMA	100%	Rp70.250.000	DAU		100%	Rp82.500.000
2	12	2.12.1	17 08	Survey kepuasan Masyarakat	terlaksananya survey IKM	DPMPPTSP KOTA BIMA	2 Dokumen	Rp61.740.000	DAU		2 Dokumen	Rp89.100.000
2	12	2.12.1	17 09	Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu	terlaksananya sosialisasi pelayanan secara langsung maupun tidak langsung	DPMPPTSP KOTA BIMA	20 jenis izin	Rp58.195.000	DAU		30 jenis izin	Rp235.400.000
2	12	2.12.1	17 10	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	tersedianya laporan mengenai jumlah dan realisasi Investasi yang diterbitkan setiap bulannya	DPMPPTSP KOTA BIMA	12 Dokumen	30.720.000	DAU		12 Dokumen	Rp179.300.000
					TOTAL KESELURUHAN			Rp1.819.150.600				Rp3.608.371.640



P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dibuat sebagai Pedoman Dasar Dalam Kerangka Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun Anggaran 2019.

Raba-Bima, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bima,

Drs. H. Syarifruddin, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19621029 199403 1 002

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	2.12.01	1		PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp641.044.000	DAU		20%	Rp751.585.890
2	12	2.12.01	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	DPMPTSP KOTA BIMA	310 surat masuk dan keluar	Rp63.060.000	DAU		341 surat masuk dan keluar	Rp74.415.000
2	12	2.12.01	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Persentase Pembayaran Listrik dan Internet	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Bulan	Rp84.840.000	DAU		12 Bulan	Rp55.902.000
2	12	2.12.01	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Efektivitas kerja pegawai DPMPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan kendaraan Dinas Operasional harus prima	DPMPTSP KOTA BIMA	1 Tahun	Rp5.500.000	DAU		1 Tahun	Rp9.075.000
2	12	2.12.01	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pembayaran honorarium bendahara	DPMPTSP KOTA BIMA	12 (OB)	Rp57.464.000	DAU		12 (OB)	Rp69.531.440
2	12	2.12.01	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	110 Bahan/Alat	Rp21.600.000	DAU		120 Bahan/Alat	Rp28.556.000
2	12	2.12.01	1	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	85 Jenis	Rp39.800.000	DAU		85 Jenis	Rp49.082.924
2	12	2.12.01	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	83863buah/lembar/blok/eks	Rp60.300.000	DAU		9224200buah/lembar/blok/eks	Rp76.109.000
2	12	2.12.01	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	100 Buah/Rol/meter	Rp9.000.000	DAU		100 Buah/Rol/meter	Rp9.075.000
2	12	2.12.01	0	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Disiplin kerja pegawai DPMPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan Mesin Absensi On Line	DPMPTSP KOTA BIMA	-	0	DAU		1 Tahun	Rp10.285.000
2	12	2.12.01	1	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	5 Eks	Rp42.480.000	DAU		5 Eks	Rp137.552.800
2	12	2.12.01	'01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	110 Kotak	Rp7.000.000	DAU		120 Kotak	Rp9.680.000
2	12	2.12.01	1	18	Rapat Koordinasi luar daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	1 thn	Rp250.000.000	DAU		1 thn	Rp145.321.726
2	12	2.12.01	1	19	Rapat Koordinasi dalam daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Kali	Rp0	DAU		13 Kali	Rp77.000.000

2	12	2.12.01	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp282.409.800	DAU	20%	Rp785.413.750
2	12	2.12.02	2	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda Dua	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU	-	Rp0
1	11	2.12.01	2	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung	DPMPTSP KOTA BIMA	1 unit	Rp27.250.000	DAU	7 unit	Rp109.505.000
2	12	2.12.01	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya pemenuhan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	2 unit	Rp8.250.000	DAU	8 unit	Rp79.860.000
2	12	2.12.01	2	10	Pengadaan Meubelair	meningkatnya Pengadaan Meubeler	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU	56 unit	Rp27.225.000
2	12	2.12.01	2	22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Meningkatnya masa manfaat	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Ruang gedung	Rp10.000.000	DAU	12 Ruang gedung	Rp235.950.000
2	12	2.12.01	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya masa manfaat kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP KOTA BIMA	12 OB	Rp30.249.800	DAU	12 OB	Rp49.942.750
2	12	2.12.01	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya masa manfaat perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 THN	Rp3.000.000	DAU	1 THN	Rp4.840.000
2	12	2.12.01	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya masa manfaat peralatan gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 thn	Rp3.660.000	DAU	1 thn	Rp8.591.000
2	12	2.12.01	2	42	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	DPMPTSP KOTA BIMA	1 paket	Rp200.000.000	DAU	1 paket	Rp187.000.000
2	12	2.12.01	3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp0	DAU	20%	Rp37.207.500
2	12	2.12.01	3	5	Pengadaan pakaian musus hari-hari tertentu	Meningkatnya disiplin pegawai	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU	38 stel	Rp20.691.000
2	12	2.12.01	3	6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya disiplin pegawai	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU	38 stel	Rp16.516.500
2	12	2.12.01	5		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	25%	Rp0	DAU	25%	Rp55.000.000
2	12	2.12.01	5	3	Bimbingan teknis iml peraturan perundang undangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	DPMPTSP KOTA BIMA	-	Rp0	DAU	1 thn	Rp55.000.000
2	12	2.12.01	6		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp98.921.800	DAU	20%	Rp109.928.500
2	12	2.12.01	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	3 dokumen	Rp14.272.000	DAU	2 dokumen	Rp6.655.000
2	12	2.12.01	6	3	Penyusunan Pelaporan Semester dan Prognosis	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	3 dokumen	Rp7.748.000	DAU	2 dokumen	Rp6.655.000
2	12	2.12.01	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	1 dokumen	Rp13.908.000	DAU	1 dokumen	Rp14.822.500

2	12	2.12.01	6	5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	3 Dokumen	Rp39.194.000	DAU	4 Dokumen	Rp66.066.000
2	12	2.12.01	6	6	Penyusunan LAKIP. dan LPPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	2 dokumen	Rp23.799.800	DAU	2 dokumen	Rp22.385.000
2	12	2.12.01	6	7	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang milik Daerah	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan Aset dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	DPMPTSP KOTA BIMA	0	Rp0	DAU	2 dokumen	Rp45.496.000
	12	2.12.01	15		Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Penanaman modal	DPMPTSP KOTA BIMA	%	Rp155.295.000	DAU	%	Rp406.115.000
2	12	2.12.01	15	8	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	terlaksananya Perusahaan yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP KOTA BIMA	50 perusahaan	Rp80.300.000	DAU	50 perusahaan	Rp153.340.000
2	12	2.12.01	15	12	Kerjasama Investasi antar Daerah	terlaksananya kerjasama investasi antar daerah	DPMPTSP KOTA BIMA	3 MOU	Rp74.995.000	DAU	3 MOU	Rp136.450.000
2	12	2.12.01	16		Program Peningkatan iklim investasi dan promosi	Meningkatnya minat investasi PMDN/PMA	DPMPTSP KOTA BIMA	20%	Rp111.815.000	DAU	20%	Rp238.821.000
2	12	2.12.01	16	4	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	tersedianya dokumen sistem informasi penanaman modal daerah	DPMPTSP KOTA BIMA	2 Dokumen	Rp69.895.000	DAU	2 Dokumen	Rp123.596.000
2	12	2.12.01	16	5	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	tersedianya dokumen sistem informasi penanaman modal daerah	DPMPTSP KOTA BIMA	2 Dokumen	Rp41.920.000	DAU	2 Dokumen	Rp123.596.000
2	12	2.12.01	51		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	Rata-rata lama proses penyelenggaraan pelayanan perizinan	DPMPTSP KOTA BIMA	1 Hari	Rp260.600.000	DAU	1 Hari	Rp962.500.000
2	12	2.12.01	51	1	Peningkatan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya standar pelayanan terhadap setiap izin usaha/Non usaha yang di terbitkan	DPMPTSP KOTA BIMA	97 Dokumen	16.125.000	DAU	3000 lembar izin	Rp275.000.000
2	12	2.12.01	51	4	Penyelenggaraan pelayanan perijinan satu pintu	terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha/non usaha	DPMPTSP KOTA BIMA	2500 LEMBAR IZIN	190.375.000	DAU	3000 lembar izin	Rp275.000.000
2	12	2.12.01	51	13	Melakukan Verifikasi Lapangan	terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	DPMPTSP KOTA BIMA	1000 izin usaha/non usaha	54.100.000	DAU	1000 izin usaha/non usaha	Rp247.500.000
2	12	2.12.01	17		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI, PENGADUAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN	IKM (Indeks kepuasan Layanan)	DPMPTSP KOTA BIMA	Baik (62,51-81,25)	Rp269.065.000	DAU	Baik (62,51-81,25)	Rp261.800.000
2	12	2.12.1	17	06	Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersil	tersedianya dokumen SOP tentang Persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha/izin operasional PBTSE	DPMPTSP KOTA BIMA	95 SOP	48.160.000	DAU	96 sop	Rp82.500.000

2	12	2.12.1	17	07	Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	terpenuhinya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	DPMPTSP KOTA BIMA	100%	Rp70.250.000	DAU	100%	Rp82.500.000
2	12	2.12.1	17	08	Survey kepuasan Masyarakat	terlaksananya survey IKM	DPMPTSP KOTA BIMA	2 Dokumen	Rp61.740.000	DAU	2 Dokumen	Rp89.100.000
2	12	2.12.1	17	09	Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu	terlaksananya sosialisasi pelayanan secara langsung maupun tidak langsung	DPMPTSP KOTA BIMA	20 jenis izin	Rp58.195.000	DAU	30 jenis izin	Rp235.400.000
2	12	2.12.1	17	10	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	tersedianya laporan mengenai jumlah dan realisasi Investasi yang diterbitkan setiap bulannya	DPMPTSP KOTA BIMA	12 Dokumen	30.720.000	DAU	12 Dokumen	Rp179.300.000
TOTAL KESELURUHAN									Rp1.819.150.600			Rp3.608.371.640